



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frederik C.P Koenunu, ST, M.H**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,

**Ayodhia G. L. Kalake**

Pihak Pertama,

**Frederik C.P Koenunu, ST, M.H**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,35 Index point	2,7 Index point		<p>Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan <math>\times 100</math></p> <p>Nilai indeks SPBE hasil evaluasi Kementerian RB pada tahun berjalan</p>
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	76,99 Skor	77 Skor		<p>Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada tahun berjalan <math>\times 100</math></p> <p>Nilai keterbukaan informasi publik hasil evaluasi KI Pusat pada tahun berjalan</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	
		Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	77,479 Skor	79,078 skor		$\frac{\text{Nilai Tingkat Pengamanan Informasi daerah yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai Tingkat Pengamanan Informasi daerah hasil evaluasi BSSN pada tahun berjalan}} \times 100$
		Percentage Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi	100 %	100 %		$\frac{\text{Percentage layanan distribusi Intranet terintegrasi di PD yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Percentage layanan distribusi Intranet terintegrasi di PD yang direalisasi pada tahun berjalan}} \times 100$

## B. Pelaksanaan Anggaran

	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	<b>APBD</b>		
	<b>a) Belanja (program)</b>	<b>Rp. 13,590.100.235</b>	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.335.135.315	Realisasi minimal 90%
	2. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.118.734.200,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.100.090.720,-	Realisasi minimal 85%
	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 36.140.000,-	Realisasi minimal 85%
	<b>b) Pendapatan</b>	<b>Rp. 60.000.000,-</b>	Realisasi minimal 90%
	<b>Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)</b>	<b>Rp. 13.650.100.235</b>	Realisasi minimal 90%
2)	<b>APBN</b>		

Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		
1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	-
2. Bina Administrasi Kewilayahan	Rp.	-
Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp.	-

C. Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyiapan IKPD, LKPD, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APSP sebagai berikut:

1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) jenis;

I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;

J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);




K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);

**L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.**

Kupang, 7 Desember 2023


Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

**Ayodhia G. L. Kalake**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**Frederik C. P. Koennu, ST, M.H**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	